

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberi gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2019 dengan menpedomani visi dan misi Gubernur Jambi dan Program prioritas baik nasional maupun daerah agar terwujudnya Jambi TUNTAS 2016-2021.

Untuk melaksanakan program pemabnagunan Tahun 2019 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
14. Perda No 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;

15. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2021.
16. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (renja) adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Adapun yang menjadi Tujuan dari penyusunan Renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kondisi umum pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019;
- 2) Mengetahui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019;
- 3) Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematis penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja perangkat daerah.

#### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2 dan Capaian Renstra

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2
- 2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DP3AP2
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **Bab VII Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2018**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2 Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi mengajukan usulan program sebanyak 9 (sembilan) program dan kegiatan sebanyak 133 (seratus tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional
13. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan Pengadaan mebeleur
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
9. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
10. Kegiatan rehabilitas sedang/berat gedung kantor
11. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor

C. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- F. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
1. Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
  2. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak
  3. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  4. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
  5. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan
  6. Kegiatan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
  7. Kegiatan Bimtek pencatatan dan pelaporan korban KDRT
  8. Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak
  9. Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
  10. Kegiatan Bimtek penyusunan, perencanaan dan penganggaran Responsif Gender
  11. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
  12. Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
  13. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG
  14. Kegiatan Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi
  15. Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan
  16. Sosialisasi PUG Bidang Hukum dan Pemerintahan
  17. Sosialisasi PUG Bidang Sosial Budaya
  18. Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan dan kelompok perempuan peduli lingkungan
  19. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
  20. Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
  21. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
  22. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak
  23. Kegiatan Kreasi anak provinsi jambi
  24. Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
  25. Sosialisasi Tentang Forum Anak bagi Kepala Sekolah, Guru dan Instansi Terkait
  26. In House Training Basic life support (BLS) bagi pengurus Forum Anak
  27. Pelatihan telepon sahabat anak (TESA)

28. Sosialisasi Kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
29. Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
30. Pelatihan Website Kota Layak Anak (KLA)
31. Sosialisasi Sekolah Layak Anak
32. Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak
33. Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak
34. Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan
35. Sosialisasi dampak pernikahan usia anak
36. Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
37. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem Informasi Gender dan Anak
38. Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak
39. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa
40. kegiatan Sosialisasi GN-AKSA
41. Kegiatan PATBM kab/kota se-prov jambi
42. Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak
43. Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
44. Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI

G. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2. Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa
3. Kegiatan bintek penyusunan profil desa
4. Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa
5. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa
6. Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
7. Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Desa
8. kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa
9. kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes)
10. Kegiatan Advokasi penataan desa
11. kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat
12. Kegiatan rakor pemerintahan desa
13. Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa
14. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan

15. Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa
16. Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa
17. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa
18. Kegiatan penguatan kelembagaan LPM
19. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan
21. Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat

H. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa
2. Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa
3. Kegiatan Bintel Pengelolaan Pasar Desa
4. Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa
5. Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Bumdesa
6. Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
7. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa
8. Kegiatan Pameran hasil karya di bidang pembangunan/Jambore
9. Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG
10. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa
11. Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia
12. Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan
13. Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjandal posyandu
14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Desa
15. Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas
16. Kegiatan Pengembangan kawasan Perdesaan
17. Bintel Pengembangan Usaha BUMDesa
18. kegiatan penguatan kelembagaan KPA dan P4GN
19. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan PNPM-Mpd
20. Kegiatan pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA)
21. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS

I. Program pengendalian penduduk

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Pembinaan Kampung KB
2. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)
3. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Balita (BKB)
4. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Lansia (BKL)

5. Kegiatan Pemuktahiran Data kependudukan
6. Kegiatan raker penyerasian data kependudukan dan KB se-Provinsi Jambi
7. Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan pada Kab/Kota
8. Kegiatan Workshop Pendidikan Program KKBPK
9. Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB
10. Kegiatan Penguatan Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK
11. Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro
12. Kegiatan Fasilitas sosialisasi Pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA
13. Kegiatan Sosialisasi peran tenaga kesehatan dalam peningkatan ber-KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes)
14. Kegiatan Sosialisasi peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk
15. Kegiatan Momentum HARGANAS
16. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKB
17. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKL
18. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKR
19. Kegiatan Sosialisasi Kader Posyandu

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2017, terget kinerja berdasarkan capaian hasil dan keluaran yang direncanakan mencapai 95,40 %.

Program dan kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 mencakup 9 (sembilan) program dan 133 (seratus tiga puluh tiga) kegiatan.

## **2.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan OPD**

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun

lingkup pelayanan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Anak;
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capai kinerja melalui indikator:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terlayannya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kasus kekerasan dan TPPO yang terlayani	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penguatan fasilitasi kemitraan P2TP2A	92 %	92 %	100 %
Meningkatnya peran kelembagaan PUG	Persentase OPD yang telah menganggarkan PPRG	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan PUG	40 %	40 %	100 %
Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam Politik dan ekonomi	Persentase perempuan di lembaga legislatif	30 %	12,37 %	41,23 %
	Persentase PUG ekonomi perempuan	85 %	85 %	100 %
<b>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</b>				
Terwujudnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak	Persentase peran serta Forum Anak Provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan	85 %	85 %	100 %
Terlindunginya anak yang bermasalah sosial	Persentase Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak	39 %	39 %	100 %
Tercapainya Pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	Persentase Kab/Kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	100 %	100 %	100 %
<b>BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>				
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur Desa/Kelurahan yang memahami pengelolaan administrasi desa	85 %	85 %	100 %

Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat	15 %	15 %	100 %
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	88,20 %	88,20 %	100 %
	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan perempuan di pedesaan bidang usaha ekonomi produktif	88,20 %	88,20 %	100 %
	Persentase kab/kota yang mendapatkan program inovasi Desa	-	-	-
	Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan TTG dan Posyantek	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan Desa	85 %	85 %	100 %
Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan sosial dasar	Persentase desa yang memiliki sarana dan prasarana layak dan fasilitas pelayanan sosial dasar	100 %	100 %	100 %
<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber KB	Jumlah Pembinaan kampung KB di Kab/Kota	-	-	-
	Jumlah Peserta yang mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi	-	-	-
	Jumlah Pelaporan Kependudukan dan KB	-	-	-
	Persentase lembaga yang berperan dalam pendidikan kependudukan	-	-	-
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang IMS/HIV-AIDS	-	-	-
	Jumlah Peserta/Masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi	-	-	-
	Jumlah Masyarakat yang mengikuti KB yang tidak terpenuhi	6,55 %	6,55 %	100 %
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	-
<b>Persentase Rata-Rata</b>				<b>68 %</b>

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

1. Masih tinggi nya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
2. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ditunjukan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan;
3. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal;
6. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
7. Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik;
8. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM;
9. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
10. Masihnya rendahnya sosialisasi tentang KB dan WUS;
11. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB;
12. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed);

13. Masih banyaknya pernikahan dibawah usia 20 tahun dikarenakan kebutuhan sosial;
14. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan menbandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. Sehingga dilakukan seleksi terhadap rencanapembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya diusulkan rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang baik dari pusat, provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2019 ditetapkan lebih mengarah kepada :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
2. Peningkatan Penanganan terhadap Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan ber-KB;
6. Optimaslisasi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat.

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang meliputi identitas prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten dan tingkat Provinsi.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **2.2 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dikaitkan dengan kebijakan Nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Nasional (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.

Pencapaian tersebut ditandai dengan dilakukannya beberapa program prioritas Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Pembentukan Sekretariat P2TP2A dan penyediaan rumah aman dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pembentukan kampung KB;
3. Pembentukan Desa mandiri.

### **2.3 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja OPD**

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan mengacu pada kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2017, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Anak dalam Pemenuhan, Penghormatan dan perlindungan Anak;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
4. Meningkatkan pemberdayaan, Pelayanan Sosial Dasar dan penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi ekonomi lokal;
5. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran dan Indikator Sasaran**

1.	Terlayannya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kasus kekerasan dan TPPO yang terlayani
		Persentase Penguatan fasilitasi kemitraan P2TP2A
2.	Meningkatnya peran kelembagaan PUG	Persentase OPD yang telah menganggarkan PPRG

		Persentase Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan PUG
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam Politik dan ekonomi	Persentase perempuan di lembaga legislatif Persentase PUG ekonomi perempuan
4.	Terwujudnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak	Persentase peran serta Forum Anak Provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan
	Terlindunginya anak yang bermasalah sosial	Persentase Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak
5.	Tercapainya Pelaksanaan PERlindungan Anak Berbasis Masyarakat	Persentase Kab/Kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif
6.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur Desa/Kelurahan yang memahami pengelolaan administrasi desa
7.	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat
8.	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan perempuan di pedesaan bidang usaha ekonomi produktif
		Persentase kab/kota yang mendapatkan program inovasi Desa
		Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan TTG dan Posyantek
9.	Meningkatnya partisipasi dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan Desa
10.	Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan sosial dasar	Persentase desa yang memiliki sarana dan prasarana layak dan fasilitas pelayanan sosial dasar
11.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber KB	Jumlah Pembinaan kampung KB di Kab/Kota Jumlah Peserta yang mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi Jumlah Pelaporan Data Kependudukan dan KB

	Persentase lembaga yang berperan dalam pendidikan kependudukan
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang IMS/HIV-AIDS
	Jumlah Peserta/Masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi
	Jumlah Masyarakat yang mengikuti KB yang tidak terpenuhi
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

## 2.4 Program Dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

15. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
16. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
18. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
19. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
20. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
23. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
24. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
26. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional
27. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
28. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

12. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
  13. Kegiatan Pengadaan mebeleur
  14. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  15. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  16. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  17. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  18. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  19. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
  20. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
  21. Kegiatan rehabilitas sedang/berat gedung kantor
  22. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor
- C. Program Peningkatan disiplin Aparatur**  
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.
- D. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
- a. Pendidikan dan pelatihan formal.
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- F. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
45. Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
  46. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak
  47. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  48. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
  49. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan
  50. Kegiatan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
  51. Kegiatan Bimtek pencatatan dan pelaporan korban KDRT
  52. Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak
  53. Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
  54. Kegiatan Bimtek penyusunan, perencanaan dan penganggaran Responsif Gender
  55. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
  56. Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
  57. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG
  58. Kegiatan Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

59. Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan
60. Sosialisasi PUG Bidang Hukum dan Pemerintahan
61. Sosialisasi PUG Bidang Sosial Budaya
62. Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan dan kelompok perempuan peduli lingkungan
63. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
64. Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
65. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
66. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak
67. Kegiatan Kreasi anak provinsi jambi
68. Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
69. Sosialisasi Tentang Forum Anak bagi Kepala Sekolah, Guru dan Instansi Terkait
70. In House Training Basic life support (BLS) bagi pengurus Forum Anak
71. Pelatihan telepon sahabat anak (TESA)
72. Sosialisasi Kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
73. Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
74. Pelatihan Website Kota Layak Anak (KLA)
22. Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
23. Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa
24. Kegiatan bintek penyusunan profil desa
25. Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa
26. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa
27. Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
28. Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Desa
29. kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa
30. kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes)
31. Kegiatan Advokasi penataan desa
32. kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat
33. Kegiatan rakor pemerintahan desa
34. Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa
35. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan
36. Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa
37. Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa
38. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa
39. Kegiatan penguatan kelembagaan LPM

40. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
41. Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan
42. Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat
  
75. Sosialisasi Sekolah Layak Anak
76. Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak
77. Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak
78. Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan
79. Sosialisasi dampak pernikahan usia anak
80. Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
81. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem Informasi Gender dan Anak
82. Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak
83. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa
84. kegiatan Sosialisasi GN-AKSA
85. Kegiatan PATBM kab/kota se-prov jambi
86. Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak
87. Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
88. Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI

**G. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2. Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa
3. Kegiatan bintek penyusunan profil desa
4. Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa
5. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa
6. Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
7. Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Desa
8. kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa
9. kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes)
10. Kegiatan Advokasi penataan desa
11. kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat
12. Kegiatan rakor pemerintahan desa
13. Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa
14. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan
15. Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa

16. Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa
17. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa
18. Kegiatan penguatan kelembagaan LPM
19. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan
21. Kegiatan Pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah, dan masyarakat hukum adat

#### **H. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

22. Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa
23. Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa
24. Kegiatan Bintek Pengelolaan Pasar Desa
25. Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa
26. Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Bumdesa
27. Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
28. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa
29. Kegiatan Pameran hasil karya di bidang pembangunan/Jambore
30. Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG
31. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa
32. Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia
33. Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan
34. Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu
35. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Desa
36. Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas
37. Kegiatan Pengembangan kawasan Perdesaan
38. Bintek Pengembangan Usaha BUMDesa
39. kegiatan penguatan kelembagaan KPA dan P4GN
40. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan PNPM-Mpd
41. Kegiatan pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA)
42. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS

#### **I. Program pengendalian penduduk**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

20. Kegiatan Pembinaan Kampung KB
21. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)
22. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Balita (BKB)
23. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Lansia (BKL)
24. Kegiatan Pemuktahiran Data kependudukan
25. Kegiatan raker penyerasian data kependudukan dan KB se-

Provinsi Jambi

26. Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan pada Kab/Kota
27. Kegiatan Workshop Pendidikan Program KKBPK
28. Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB
29. Kegiatan Penguatan Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK
30. Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro
31. Kegiatan Fasilitas sosialisasi Pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA
32. Kegiatan Sosialisasi peran tenaga kesehatan dalam peningkatan ber-KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes)
33. Kegiatan Sosialisasi peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk
34. Kegiatan Momentum HARGANAS
35. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKB
36. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKL
37. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKR
38. Kegiatan Sosialisasi Kader Posyandu

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun 2019 dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019n sesuai dengan Visi Provinsi Jambi menuju Jambi TUNTAS Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jambi isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2019 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi , diikuti dengan upaya-upaya pemecahan yang efektif dan efesien sehingga dapat mendorong tercapainnya seluruh target pembangunan Tahun 2019 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.

**KEPALA DINAS**

**Dra. LUTHPIAH**  
**Pembina Tk.I**

**Nip. 19691215 198908 2 002**

# LAMPIRAN